

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

- A, Rohman. & Larasati, D. C. 2023. *Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Revitalization Of People's Markets As An Effort To Keep The Existence Of Traditional Markets*. Anterior Jurnal, 22(2).
- Ariani, D. & Sihombing. T. 2023. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan*. Jurnal Niara, 16(2).
- Arni, A. 2022. *Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Makassar*. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 2(3).
- Bahar, F, et. all. 2022. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, 3(1).
- D., Desrinelti, dkk. 2021. *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1).
- Darwanis & Chairunnisa, S. 2013. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 2.
- Engkus, E. 2020. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung*. Jurnal Governansi, 6(1).
- F, Iswari., 2020. *Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. JCH Jurnal Cendekia Hukum, 6(1).
- Hartono, H., et. all., 2020. *Analisa Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar (Studi pada Pasar Tradisional Desa Bulubrangsi Kec. Laren Kabupaten Lamongan)*. PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(2).
- Herwati, H, & Mushonifah, W. 2021. *Konsep Kepemimpinan Berbasis Qur'ani*. Attractive: Innovative Education Journal, 3(3).
- Jumanah, Natta Sanjaya and Ipah Mulyani. (2019). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional*. Vol. 3, No. 2.
- Luturmas, J., dkk. 2024. *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(7).

- M, E. Rinaldo, dan Pradikta, H. Y. 2021. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1).
- M., Batubara, dkk. 2022. *Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia*. VISA: Journal of Vision and Ideas, Vol. 2. No. 1.
- Mais, R. G., dan Palindri, L. 2020. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 1(1),
- Marhadila, F. Dkk. 2024. *Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 1(4).
- Martin. I. 2017. *Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)*. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2).
- Mubarak, R., & Trisna, W. 2021. Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- R. Riwukore, J., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). *Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik. Vol. 7. No. 1.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1).
- Rosramadhana dan B. A. Simanjuntak. 2018. *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- T, Widanti, N. P. 2022. *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1).

B. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2019. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Qur'an Terjemahan. *QS. An-Nisa', ayat (58)*.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam, al-Munjid*.

- Dwiyanto, Agus. 2021. *Menujudkan Good Governance melalui pelayanan public*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, Hellen Last. *Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah*. Guepedia.com.
- Guntoro, M. 2021. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Cendekia Jaya, 3(2).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamzani, A. Irwan dan Havis Aravik. 2021. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- J. P. 2020. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Otonomi*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Wewenang*.
- Manan, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- Mnzhur, Ibn. 1968. *Lisan al-Arab*, juz 6. Beirut: Dar al-Shadr.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1971. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco.
- R, HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahjono, Padmo. 1977. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellink*. Jakarta: Melati Studi Group.

C. Studi Literatur

Akhir, Zainur. 2021. *Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berddampak Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru*. Thesis: Universitas Islam Riau. Repository UIR.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*. Jakarta: FH-UI.

Nugraha., F., & Khairani, K. 2023. *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Unes Law Review, 5(3).

R. Siregar, A. 2019. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyarah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*. (Doctoral Dissertation, IAIN Padangsidempuan).

D. Internet

Memontum. "Bupati Trenggalek Akan Bentuk Tim Pengelola Pasar Pon". Dimuat pada tanggal 21 Januari 2021 oleh laman Memontum.com.

Muttaqin. Adhar. "*Ratusan Pedagang Trenggalek Demo, Protes Retribusi Pasar Naik 350 Persen*". Dimuat pada Senin, 06 Mei 2024 dalam DetikJatim.com.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. *Visi Misi*. Dimuat pada 17 September 2014 dalam Website Resmi Pemkab Trenggalek.

E. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal II ayat (1)*

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara*.

Peraturan Pemerintah. No. 35 Tahun 2023, tentang *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, *tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 5 dan 6 tentang *Administrasi Pemerintahan*

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

UU. No. 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

F. Hasil Wawancara

Data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Sistem Informasi Satu Data Statistika Sektoral Pemkab

Hasil Wawancara dengan Pedagang di Pasar Pon. Ibu Sri Kurnia dan Ibu Dewi.

Hasil Wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Perdagangan Diskomidag Bapak Ari Suryono.